

# PERAN UNITED NATION POPULATION FUND (UNFPA) DALAM MENGATASI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh : Chindy Monika Sinulingga

*email: chindymonikaa@gmail.com*

Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP, M.Si

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This research focuses on the role of UNFPA in helping its member states, which in this case is Indonesia, to eradicate gender based violence specially at Covid-19 Pandemic situation. Indonesia is one of the many countries that face gender based violence with increasing victim numbers per year, and more increasing at the era of Covid-19 Pandemic that brought many loss at so many life's aspects. Therefore, the purpose of this research is to understand how intergovernmental organization actor contributes to solve complex phenomenon that involves so many parties and many cause aspect layers.*

*In analyzing the case study, this research applies the theory of role and function of international organizations and the systemic level of analysis to understand the influence of non-governmental organization to international actor's behaviors. The datas are collected by using explanatory qualitative methodology in order to gain a deeper analysis and understanding. Most of the datas are published by UNFPA and other governmental internal, as such Komnas Perempuan, and others annual report from independent organization.*

*The results of this research showed that UNFPA's contribution in helping Indonesia in combating gender based violence was through assisting cooperation in the form of creating the process of policies making and partnership programs procedures, collaborating with non-governmental organizations, opening and providing job oppurtunities for the Indonesian people especially for women and youth, news and journalism, and proceed to carryiong out publication of information reports. However, as an non-governmental organization that does not have the power to pressure the governments to implement international laws. It is clear that the success of combatting sexual explanation and human trafficking depends on the commitment of the Greece government to solve its problems.*

***Keywords:*** UNFPA, International Organization, Gender-based Violence, Covid-19 Pandemic, Indonesia

## PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang kajian peran United Nations Population Fund dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender terutama kepada perempuan di Indonesia dan berfokus pada periode tahun 2019-2020. Diawali dengan budaya Indonesia yang sampai saat ini masih berlangsung dan sudah sangat terkenal sehingga tidak sulit untuk mengenalinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu budaya patriarki.

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk daripada perilaku atau perbuatan diskriminasi yang hadir akibat budaya patriarki tersebut dan biasanya tertuju pada perempuan sebagai korbannya dikarenakan status mereka yang dianggap berada di bawah.

*Inter-Agency Standing Committee* mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai sebuah terminologi untuk semua tindakan membahayakan yang dilakukan di luar kehendak korban yang didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Kekerasan berbasis gender juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu kekerasan seksual, fisik, praktek tradisional yang membahayakan, sosial ekonomi dan emosional serta psikologis.<sup>1</sup>

Isu mengenai gender dalam studi hubungan internasional sendiri sebenarnya juga bukan sebuah isu baru, melainkan sudah lama melekat dan menjadi salah satu kajian dalam studi hubungan internasional melalui perubahan dan perkembangan ilmu seiring perkembangan waktu.

Terdapatnya perubahan *urgency* terhadap pembahasan isu gender dalam hubungan internasional, dimana yang sebelumnya dianggap sebagai isu yang tidak lebih penting daripada isu negara, kemudian menjadi sebuah kajian yang saat ini dianggap sebagai sebuah fenomena yang sangat penting ini diawali pada saat studi hubungan internasional dikritik sebagai studi bias gender dikarenakan menghasilkan diskursus yang lebih mencerminkan dan mendorong pandangan dunia yang maskulin.<sup>2</sup>

Sebuah tinjauan transnasional baru-baru ini menyatakan data survei yang menemukan bahwa proporsi perempuan mengalami serangan fisik oleh pasangan sendiri berkisar 10% hingga 69% dan bahkan Survei Nasional di Amerika Serikat memperkirakan bahwa satu dari lima (22.1%) perempuan diserang secara fisik dalam hidup mereka, dan satu dari 13 perempuan (7.7%) diperkosa oleh pasangan intim dan selanjutnya diperkirakan juga 1.3 juta perempuan mengalami penyerangan fisik dan lebih dari 201.394 perempuan mengalami pemerkosaan oleh pasangan intim. Kekerasan oleh pasangan intim menjadi sumber kekerasan paling umum pada perempuan pada rentang usia 15 sampai 44 tahun, lebih sering daripada gabungan jumlah kekerasan akibat perampokan, kecelekaan mobil, dan kematian akibat kanker, bahkan serangan fisik terhadap perempuan yang baik sudah menikah maupun belum telah menjadi masalah yang tersebar luar hingga saat ini,

<sup>1</sup> Sudirman, *Kekerasan Berbasis Gender (KBG)*, diakses 7 Oktober 2020, <https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>

<sup>2</sup> Dewi Setya, *Kritik Feminis terhadap Maskulinitas Disiplin Ilmu Hubungan*

*Internasional*, diakses 7 Oktober 2020, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/kritik-feminis-terhadap-maskulinitas-disiplin-ilmu-hubungan-internasional>

melintasi isu garis ras, orientasi seksual, usia dan sosial ekonomi.<sup>3</sup>

Data tersebut menyatakan bahwa isu kekerasan berbasis gender tidak hanya berada di Indonesia yang kental memiliki budaya patriarki, namun juga terjadi di berbagai belahan dunia bahkan negara yang sudah maju dan liberal sekalipun. Indonesia memang sudah mengalami berbagai kemajuan dan perkembangan dalam berbagai bidang dan tidak tekecuali pada kajian gender yang ditandai dengan kelahiran dan pergerakan berbagai gerakan feminisme serta perjuangan hak perempuan di Indonesia. Namun sayangnya, jumlah kekerasan berbasis gender di Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam pemberantasannya, melainkan dari tahun ke tahun catatan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan hingga saat ini.

Pada tahun 2020 sendiri, seperti yang diketahui oleh seluruh belahan dunia, pandemi Covid-19 terjadi dan mungkin jika dilihat secara sekilas pandemi yang sedang berlangsung tidak memiliki hubungan apapun terhadap kekerasan berbasis gender. Namun, pada kenyataannya keduanya memiliki hubungan yang menghasilkan peningkatan yang lebih jauh terhadap angka kekerasan berbasis gender, terutama di Indonesia.

Pandemi Covid-19 membuat perempuan semakin rentan menjadi korban kekerasan, baik secara langsung maupun dalam ranah *online*.

Jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 892 kasus sampai Mei 2020 dan angka tersebut setara dengan 63% dari total pengaduan sepanjang 2019 dalam laporan Komnas Perempuan Indonesia. Mayoritas laporan masuk pada bulan April atau pada bulan kedua kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berjalan di sejumlah daerah Indonesia dengan ranah paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal (RP) dengan presentase 69% dari total kasus sepanjang Januari-Mei 2020 disusul dengan kekerasan di ranah komunitas (30%) dan negara (1%).<sup>4</sup>

UNFPA (*United Nations Population Fund*) merupakan badan *inter-governmental* yang berada di bawah otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung program penyediaan suplai dan layanan untuk merawat kesehatan di empat wilayah yaitu negara Arab dan Eropa, Asia dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika sub-Sahara dan bekerja di lebih dari 140 negara, teritori dan wilayah. UNFPA juga mendorong partisipasi pemuda dan perempuan untuk membantu mengembangkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, UNFPA juga memiliki empat fokus utama dalam agenda kinerja mereka yang masing-masing memiliki sub kajian yang terdiri dari *sexual and reproductive health, young people, human rights and gender equality* serta *population matters*.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Nancy Felipe Russo and Angela Pirlott, *Gender-Based Violence*. Annals of the New York Academy of Sciences. 2018. Hlmn. 182

<sup>4</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Covid-19*, diakses 7 October 2020,

<https://katadata.co.id/0/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>

<sup>5</sup> UNFPA, *About Us*, diakses 7 October 2020, <https://www.unfpa.org/>

Kerjasama UNFPA dan Indonesia dimulai pada tahun 1972 untuk memberikan layanan keluarga berencana yang kuat, penelitian demografis, dan program pendidikan kependudukan di sekolah. Pada saat ini UNFPA merupakan salah satu mitra yang paling berharga bagi Indonesia terhadap bidang kesehatan reproduksi, pemuda, kependudukan serta pembangunan dan juga kesetaraan gender beserta hak asasi manusia. Dalam melaksanakan agenda kerja dan juga bantuan yang diberikan untuk Indonesia, UNFPA juga menjalin hubungan dengan BAPPENAS, BKKBN, MOH, MOWECP, BPS-Statistics Indonesia, dan Komnas Perempuan Indonesia.<sup>6</sup>

## KERANGKA TEORI

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data-data primer dan sekunder.<sup>7</sup>

Perspektif yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah perspektif pluralisme. Pluralisme

merupakan perspektif yang menekankan perhatiannya dalam konteks isu hubungan internasional yang lebih luas dan cenderung menaruh *concern* pada isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Empat asumsi perspektif pluralisme, yaitu:<sup>9</sup> Aktor non negara adalah aktor yang penting dalam hubungan internasional; Negara bukan aktor tunggal; Negara bukan aktor rasional; Agenda politik internasional.

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teori organisasi internasional. Pada dasarnya konsep dari organisasi internasional adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan pemerintah dengan fokus utama menyelesaikan isu-isu yang terjadi pada masyarakat atau isu-isu sosial.<sup>10</sup>

Organisasi internasional juga merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok pemerintah pada negara yang berbeda.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> UNFPA Indonesia, *About Us*, diakses 7 Oktober 2020, <https://indonesia.unfpa.org/en/node/25335/>

<sup>7</sup> Sandu Siyoto, M.Ali Sodik "Dasar Metodologi Penelitian" Yogyakarta, Literasi Media Publishing cetakan 1 juni 2015, halaman 11-12.

<sup>8</sup> Daniel J. Levine, David M. McCourt, "Why Does Pluralism Matter When We Study Politics? A View from Contemporary International Relations", *American Political Science Association*, Vol.16, No.1, (2018), hlm 92.

<sup>9</sup> M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional :Sebuah pendekatan Paradigmatik". *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2, (Februari 2012), hlm 15-16

<sup>10</sup> Klabbers, J. (2005). Two Concepts of International Organization. *International Organizations Law Review* 2, 2, 277-293.

<sup>11</sup> Pardede, Molisa T, & Den Yealta. "Upaya World Wide Fund for Nature (WWF) Dalam Mengatasi Perdagangan Penyu Ilegal Di Provinsi Bali Tahun 2008-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pandemi Covid-19 dan Isu Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia.**

Laporan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan kekerasan berbasis gender meningkat sebanyak 63% selama masa pandemi COVID-19 yang salah satu penyebabnya adalah karena perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hingga Oktober 2020, Komnas Perempuan telah menerima sebanyak 1.617 laporan yang terdiri atas 1.458 kasus kekerasan berbasis gender dan 159 non kekerasan berbasis gender. Kekerasan yang dilaporkan terjadi di ranah personal terdapat sebanyak 960 kasus, komunitas 480 kasus, dan negara 18 kasus.<sup>12</sup>

Menurut studi yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) bersama dengan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab South East Asia (J-PAL SEA) yang berjudul “Memahami Kesejahteraan dan Penghidupan Masyarakat Saat Pandemi COVID-19 di Indonesia” dengan tujuan untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap kekerasan berbasis gender dan pekerjaan mengasuh anak yang tidak dibayar menunjukkan bahwa sedikitnya 42% masyarakat yang disurvei telah melaporkan mengalami beberapa bentuk kekerasan berbasis gender selama pandemi COVID-19. Studi

tersebut dilakukan secara online dan melalui wawancara telepon dari Oktober hingga November 2020, kepada lebih dari 1.000 responden di delapan kota. Sekitar 46.5% responden adalah perempuan, sementara 8% perempuan kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, presentasi laki-laki yang menganggur lebih tinggi yaitu 15,2%. 53% dari responden juga kehilangan pekerjaan karena tekanan ekonomi akibat pandemic yang juga mempengaruhi kesehatan mental dan menyebabkan konflik keluarga yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan terjadinya pembatasan di tempat kerja, sekolah, dan juga fasilitas umum juga menjadi alasan masyarakat di haruskan untuk lebih banyak tinggal di rumah pada keluarga dengan ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi, dan di tambah dengan beban perempuan semakin meningkat karena harus mengurus rumah tangga dan mendampingi anak belajar dari rumah, dan sebagian juga harus berusaha mencari tambahan penghasilan menjadi penyebab terbuka nya celah kasus kekerasan terhadap perempuan semakin terbuka. Meningkatnya beban keluarga, stress, kesulitan ekonomi akibat kehilangan penghasilan dan pekerjaan dalam keluarga akhirnya dapat menyebabkan KDRT dan kekerasan berbasis gender lainnya.<sup>13</sup>

Peningkatan kekerasan berbasis gender terutama yang bersifat online

---

*Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 2, no. 2. 2015.

<sup>12</sup> “Kekerasan Berbasis Gender Meningkat 63persen selama Pandemi,” diakses pada 22 Oktober 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/1868988/kekerasan-berbasis-gender-meningkat-63-persen-selama-pandemi-15:22>.

<sup>13</sup> Susiana, Sali. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.” Diakses pada 05 Mei 2022, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf)

(KBGO) selama pandemi disebabkan oleh situasi dan kondisi yang mengharuskan setiap orang untuk tetap tinggal di rumah saja sehingga semua kegiatan dan proses memperoleh informasi dilakukan secara daring. Situasi serba daring ini membuat sejumlah platform media sosial semakin eksis digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Penyebab utama kasus ini semakin marak adalah platform media sosial yang tidak aman dan banyaknya akun yang tidak berlandaskan identitas asli. Selain itu, identitas yang tidak asli dalam akun sosial media juga sangat menunjang seseorang untuk dapat melakukan KBGO. Para pelaku dengan bebas melakukan sebuah tindak kekerasan online mulai dari menghadirkan komentar bahkan sampai mengunggah ulang unggahan sasarannya dan pelaku merasa aman karena kurangnya keamanan dalam media sosial.

Terkait hal tersebut, kementerian PPPA telah bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi akan meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang di dalamnya termasuk upaya pelatihan bagi kelompok usaha kecil dan menengah, terutama kelompok perempuan, serta pelibatan kaum perempuan pada perencanaan penganggaran keuangan desa dan pengambilan keputusan. Koordinator nasional Aliansi laki-laki, Wawan Suwandi mengatakan bahwa mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan pendekatan reflektif terkait definisi ulang maskulinitas kepada kaum laki-laki merupakan hal yang penting untuk

dilakukan, terutama di masa pandemi Covid-19.<sup>14</sup>

### **Kontribusi UNFPA dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia.**

UNFPA mendukung pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender melalui tindakan yang bertujuan untuk memperkuat respons sektor kesehatan terhadap kekerasan berbasis gender sebagai titik masuk untuk memberikan layanan kepada para korban kekerasan, memberikan saran kebijakan tentang pencegahan kekerasan berbasis gender, mendukung ketersediaan dan penggunaan data untuk perumusan program dan kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender.

Kontribusi pertama yang telah di berikan UNFPA untuk Indonesia adalah membantu kebijakan dan prosedur program kemitraan. Dalam pengambilan kebijakan program mengenai permasalahan kekerasan berbasis gender dan isu kesetaraan gender lainnya yang berkaitan, UNFPA berfokus pada nilai-nilai konvensi kebijakan program yang sudah ditentukan dalam program kerjasama dan dijadikan sebagai standar dalam pemenuhan kesetaraan gender. Kebijakan ini berlaku untuk semua kegiatan program, baik yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana, atau langsung oleh UNFPA. Dalam pengambilan kebijakan program mengenai permasalahan kekerasan berbasis gender dan isu kesetaraan gender lainnya yang berkaitan, UNFPA berfokus pada nilai-nilai konvensi kebijakan program yang sudah ditentukan dalam program

<sup>14</sup> Kemenpppa, "Terapkan Nilai Kesetaraan Gender dan Pembagian Peran dalam Rumah

Tangga Terutama Saat Pandemi Covid-19", 2021

kerjasama dan dijadikan sebagai standar dalam pemenuhan kesetaraan gender.

Membuka lowongan pekerjaan juga menjadi salah satu kontribusi yang diberikan UNFPA untuk menangani salah satu dampak besar yang diberikan oleh Pandemi Covid-19 adalah peningkatan jumlah pengangguran dikarenakan banyak sekali lapangan kerja yang tutup, yang selanjutnya juga menjadi salah satu penyebab peningkatan masalah kekerasan berbasis gender terutama dalam ranah rumah tangga. UNFPA sebagai badan internasional yang berada di bawah naungan PBB tentunya menjadi sarana yang tepat untuk menjadi penyalur bantuan terhadap lowongan pekerjaan, terutama bagi perempuan dan orang rentan kekerasan lainnya. Beberapa lowongan yang di berikan oleh UNFPA, yaitu Konsultan nasional – Titik fokus untuk keterlibatan dan kepemimpinan pemuda<sup>15</sup>, Konsultan Nasional – Anggota Tim – Penyusunan pedoman dan modul pelatihan pemerintah dengan menggunakan indeks pembangunan pemuda di tingkat nasional dan daerah<sup>16</sup>, Konsultan nasional (kesehatan ibu dan SRHR) untuk tinjauan tengah semester Berani – Program kesehatan dan hak seksual dan reproduksi yang lebih baik untuk

semua di Indonesia<sup>17</sup>, Petugas perlindungan social, Program pelatihan, Petugas darurat kekerasan berbasis gender, Program keterlibatan dan kepemimpinan pemuda, Petugas darurat kesehatan seksual dan reproduksi.

Dalam era globalisasi modern pada saat ini, pemberitahuan berita kepada masyarakat sudah menjadi celah bagi segala pihak untuk mendapatkan informasi, dan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi gerak terhadap lingkungan luar juga menjadi pendorong masyarakat untuk semakin mencari berita sebaagai sumber informasi maupun hiburan. Oleh karena itu, menerbitkan berita juga menjadi salah satu peran yang dilakukan oleh UNFPA untuk mengatasi masalah kekerasan berbasis gender di Indonesia dengan harapan berita-berita tersebut menjadi sarana informasi yang berguna bagi segala pihak, terutama Perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk dapat melindungi diri dan mendapat informasi mengenai layanan yang dapat mereka peroleh, serta juga untuk semakin meningkatkan awareness kepada masyarakat.

Laporan situasi tanggapan Covid-19 di Indonesia oleh

---

<sup>15</sup> “Terms of Reference,” diakses pada 15 November 2021, <https://indonesia.unfpa.org/en/vacancies/national-consultant-focal-point-youth-engagement-and-leadership-code-unfpaidnicc2105>.

<sup>16</sup> “National Consultant - Team Member - Development of a Guideline and a Training Module for the Government using the Youth Development Index”, diakses pada 15 November 2021, [https://indonesia.unfpa.org/en/vacancies/national-consultant-team-member-](https://indonesia.unfpa.org/en/vacancies/national-consultant-team-member-development-guideline-and-training-module-government-using)

[development-guideline-and-training-module-government-using](https://indonesia.unfpa.org/en/vacancies/national-consultant-team-member-development-guideline-and-training-module-government-using)

<sup>17</sup> “National Consultant (Maternal Health and SRHR) for the Midterm Review of BERANI - Better Sexual and Reproductive Health and Rights for all in Indonesia Programme”, diakses pada 15 November 2021, <https://indonesia.unfpa.org/en/vacancies/national-consultant-maternal-health-and-srhr-midterm-review-berani-better-sexual-and>

UNFPA<sup>18</sup>, Respon Covid-19 di Indonesia periode Juli-Agustus 2020<sup>19</sup>, **Ringkasan Temuan (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Masa Darurat, Mempromosikan Hak dan Kesetaraan Gender Paska Bencana (Respon Kemanusiaan UNFPA di Sulawesi Tengah) <sup>20</sup> juga menjadi beberapa hasil yang lahir daripada kontribusi UNFPA.**

Seperti pada penulisan di atas, sudah diketahui bahwa UNFPA menjalin beberapa kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia, salah satunya adalah Pemerbadayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam mengadopsi Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun oleh P2TP2A DKI Jakarta, Yayasan Pulih, Lembaga Penyedia Layanan Bersama Kemen PPA di tahun 2020. Jika melihat dengan sekilas saja, pengadopsian panduan tersebut tidak menjadi suatu hal yang besar, namun pada kenyataannya hal tersebut menjadi salah satu keberhasilan sukses dari kontribusi UNFPA kepada Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena sejak dahulu, korban kekerasan berbasis gender dianggap tidak penting dan sering sekali diabaikan, namun dengan adanya upaya tersebut, korban mendapat akses untuk tetap bisa dilayani dengan baik dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk protokol yang sudah ditetapkan<sup>21</sup>.

Untuk tahun 2020 yaitu tahun dimana pandemi covid-19 sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, UNFPA dengan segala kontribusinya berhasil membantu sebanyak 323 korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan layanan bantuan, meraih sebanyak 3.940 masyarakat dalam aktifitas penyebaran informasi mengenai kesadaran kekerasan berbasis gender, membangun 12 ruman aman bagi para korban kekerasan berbasis gender, serta menyediakan 165 fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan khusus penanganan korban kekerasan berbasis gender termasuk klinik penanganan pemerkosaan.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Isu kekerasan berbasis gender di Indonesia sendiri mendapatkan tekanan dan peningkatan yang drastis baik dari segi dalam negeri maupun dari segi internasional yang menyebabkan isu ini memang harus segera diatasi, terutama korban daripada isu ini juga banyak terdiri dari anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena gunung es yang juga kerap digambarkan sebagai keadaan isu ini juga menjadi salah satu penyebab tingkat urgensi isu ini sangat tinggi, karena jika tidak segera diatasi maka isu ini dapat semakin memberikan dampak yang lebih luas dan lebih kompleks lagi daripada apa yang sudah terjadi sekarang.

<sup>18</sup> Megumi Uchino, "UNFPA Indonesia Covid-19 Response Situational Reprt," November 2020

<sup>19</sup> Megumi Uchino, "UNFPA Indonesia Covid-19 Reponse Situational Report," Agustus 2020

<sup>20</sup> UNFPA Indonesia, "Mempromosikan Hak & Kesetaraan Gender Paska Bencana:

Respon Kemanusiaan UNFPA di Sulawesi Tengah," 2018, hlm 1

<sup>21</sup> Rifki Rosyad, "Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial", hal.53, 2021, Leks:Bandung.

<sup>22</sup>

<https://www.unfpa.org/data/emergencies/indonesia-humanitarian-emergency>

UNFPA sebagai salah satu aktor internasional yang turun tangan dalam membantu Indonesia mengatasi isu kekerasan berbasis gender, berperan sebagai aktor independen yang berkontribusi membantu menyelesaikan isu ini namun tetap berjalan selaras dengan lembaga pemerintahan Indonesia melalui kerja sama dengan pihak pemerintah dalam proses pembuatan pedoman dan panduan dasar dalam menangani isu kekerasan berbasis gender, sosialisasi dan kepada masyarakat sipil melalui gerakan sosial dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan memberikan pedoman dasar mengenai kasus ini.

Melihat bagaimana pengaruh yang diberikan pandemi Covid-19 kepada segala bidang kehidupan masyarakat dan bagaimana menjolak tingginya korban dari kasus ini, UNFPA sudah memberikan kontribusi-kontribusi yang banyak dan membantu sekali bagi Indonesia sendiri. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keberhasilan-keberhasilan yang sudah tercapai oleh UNFPA di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 dan juga keberhasilan yang masih terjadi walau dalam kurun waktu pandemi Covid-19. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa budaya patriarki yang masih kental hingga saat ini, pembangunan dan edukasi yang tidak merata di Indonesia, banyaknya stigma-stigma negative yang sudah lama melekat, perbedaan gaya hidup dari generasi ke generasi, angka kemiskinan yang masih tinggi dan kendala-kendala lainnya yang masih menjadi akar penyebab kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia menyebabkan kontribusi yang diberikan UNFPA kepada Indonesia pada Pandemi COvid-19 masih memiliki perjalanan yang

panjang untuk benar-benar mencapai keberhasilan mutlak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

C, Hasanbegovic. *Children and Gender Based Violence: An Overview of Existing Conceptual Frameworks*. Sweden: Save the Children Sweden. 2007.

G, Mahardika. *Belenggu Budaya Patriarki terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. 2018.

Government, UNFPA. *Country Programme Action Plan 2021 - 2025 for the Programme of Cooperation between the Government of Indonesia and the United Nations Population Fund*. Government of Indonesia & UNFPA. 2021.

Henderson, W. *International Relations*. McGraw Hill, 1998.

Indonesia, UNFPA. *Pencegahan & Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Masa Darurat*. Sulawesi Tengah: UNFPA Indonesia. 2019.

KPPPA, UN Women, & UNFPA. *Terapkan Nilai Kesetaraan Gender dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Saat Pandemi Covid-19*. Samarinda: DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DKP3A). 2021.

Rahman, Taufiq & Mohamad Mustar. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.

Rosyad, Rifki, Mubarak, MF Zaky & Rahman. Toleransi beragama dan harmonisasi sosial. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2021.

Ruxandra, Pandeia A. Gender Matters. Hungary: European Youth Centre Strasbourg. 2019.

UNHCR, SGBV Prevention and Response - Training Package. Asia Pacific: The UN Refugee Agency Publication. 2016.

UN Women, Essential services package for women and girls subject to violence. UN Women Headquarters. 2015.